



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2025
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	<i>RADAR BANTEN</i> ✓	4.	<i>SATELIT NEWS</i>
2.	<i>BANTEN POS</i>	5.	<i>BANTEN RAYA</i>
3.	<i>KABAR BANTEN</i>	6.	<i>Tribun Banten</i>

	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2025
	FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
	MARET	JULI	NOVEMBER	
30	APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Banten Kembali Raih Penilaian WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 di ruang Rapat Pripurna DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug Kota Serang, Rabu (30/4/2025).

Dari hasil pemeriksaan diinternal BPK, Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten Tahun 2024 ini diserahkan langsung oleh pimpinan V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bobby Adhityo Risaldi.

Dalam kesempatan tersebut Bobby menyampaikan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi Banten yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik dan juga pencapaian yang sangat membanggakan. Karena keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. "Karena provinsi Banten termasuk yang ketiga tercepat di seluruh Jawa dan Sumatera. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari BPK RI," katanya.

Gubernur Banten Andra Soni mengucapkan terima kasih atas segala masukan koreksi dan rekomendasi perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. Bahkan Pemprov Banten juga permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama dalam proses pemeriksaan mulai dari entry meeting Exit meeting sampai dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

"Dalam rangka Menindaklanjuti rekomendasi serta temuan hasil pemeriksaan, kami telah menyusun rencana aksi atau action plan sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan guna menjamin efektifitas pelaksanaannya," ujarnya.

"Kami memohon arahan serta masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar seluruh tindak lanjut hasil audit dapat diselesaikan secara tepat waktu paling lama dalam 60 hari kalender. Fokus utama kami saat ini adalah para perbaikan pengendalian internal yang masih belum optimal, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik maupun pengelolaan dana BOS di sekolah," ucap Andra.